

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 32.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep dan Teori*. Semarang: Pustaka Magister, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Perspektif, Teori, dan Praktik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Marpaung, Leden. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan HAM*. Bandung: Alumni, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022, hlm. 54.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2020.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2021.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

B. Jurnal

- Arifin, M. Zainal. "Koordinasi LPSK dan Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitria, N. (2023). *Peran LPSK dalam Memberikan Rasa Aman kepada Korban Kekerasan Domestik*. Jurnal Perlindungan Hukum.
- Hernoko, Agus Yudha. "Kewenangan Lembaga Negara dan Prinsip Ultra Vires." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021.
- Hidayat, Arif. "Urgensi Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Perlindungan Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Lubis, Andi. "Reformulasi Konsep Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Modern." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024.
- Nasution, Ismail. "Fungsi LPSK dalam Memberikan Akses Keadilan bagi Korban." *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Nugroho, Bambang. "Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021. Nugroho, Bambang. "Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Putra, Andika. "Checks and Balances dalam Kewenangan Lembaga Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum HAM dan Demokrasi*, Vol. 14, No. 1, 2024.
- Raharjo, Agus. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan terhadap Ketertiban Sosial." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Santoso, A. (2022). *Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana KDRT oleh Penyidik Polri*. Jurnal Ilmu Kepolisian.
- Santoso, Dwi. "Kualifikasi Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 27, No. 2, 2022.
- Sari, Wulan. "Kewenangan Penyidik dan LPSK dalam Kasus KDRT." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Suryani, Fitri. "Peran LPSK dalam Penanganan Korban KDRT." *Jurnal Ilmu Hukum UII*, Vol. 28, No. 1, 2021.

Syafrudin, Riza. "LPSK dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 15, No. 3, 2023.

Yuliani, R. (2022). *Hambatan Korban KDRT dalam Mengakses Keadilan Pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan LPSK yang berlaku (misalnya Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban)

D. Website

Komnas Perempuan, *CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. Pada 19 September 2025